



SOSIOLOGI

JURNAL ILMIAH KAJIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

Keserasian Sosial dan Partisipasi Etnik Lampung dalam
Pembangunan di Pedesaan (*Hartoyo*)

Implikasi Institusi Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat
(*Abdul Syani*)

Konflik Kepentingan Perusahaan HPH dengan Penduduk
Sekitar Hutan (*Handi Mulyaningsih*)

Kelembagaan Kelompok Tani pada Program Proyek Padat
Karya Sektor Kehutanan (P2KSK) (*Sujarwo*)

Pengaruh Kualifikasi/Pengelola dan Pesaing terhadap Efisiensi
Pelayanan KUD (*Satria Bangsawan*)

Transmigrasi Swakarsa: Motivasi, Proses Pengambilan Keputusan
Pindah, dan Proses Kepindahannya (*I Gede Sidemen*)

Tracer Study: Kebijakan Program Bangga Suka Desa dalam
Pengentasan Kemiskinan (*Sindung Haryanto*)

Masalah Kemiskinan pada Masyarakat Desa
(*Erom Djuhendar*)

Faktor Sosial Budaya yang Menghambat Kinerja Bidan Puskesmas
dalam Pelayanan KB dan Kesehatan di Kecamatan Natar
Lampung Selatan (*Pairulsyah*)

Pembentukan Perilaku KB Mandiri bagi Ibu Rumahtangga yang
Berperan Ganda (*Paraswati DM*)

Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana pada LP Raja Basa
Bandar Lampung (*Suwarno*)

Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Perbaikan Kampung
(*Benyamin*)

Jurnal Sosiologi	Vol. 1	No. 1	Hlm. 1-94	Bandar Lampung Maret 1999	ISSN 1411-0040
------------------	--------	-------	-----------	------------------------------	-------------------

SOSIOLOGI

Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya

Diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
berisikan makalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian

SUSUNAN TIM PENGELOLA

Penanggungjawab

Ketua Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Lampung

Pengarah

Rektor Universitas Lampung
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung
Dekan Fisip Universitas Lampung

Pemimpin Redaksi

I Gede Sidemen

Sekretaris Redaksi

Suwarno

Anggota Redaksi/Penyunting

Abdulkadir

Abdulsyani

Sindung Haryanto

Ikram

Susetyo

Penyunting Ahli

Sudjarwo (Unila)

Iwan Gardono (UI)

Heru Nugroho (UGM)

Hotman M. Siahaan (Unair)

Bendahara/Sirkulasi

Erna Rohana

Alamat Penerbit/Redaksi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung
Telp. (0721) 704626, Pesawat 512

Pengantar Redaksi

Seiring dengan semakin berkembangnya perhatian terhadap masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan, dan juga keinsyafan akan perlunya penelitian untuk perumusan berbagai kebijakan dalam pembangunan, maka dari tahun ke tahun berkembang pula aktivitas penelitian yang mengkaji berbagai permasalahan sosial di Perguruan Tinggi. Sebenarnya sudah cukup banyak hasil penelitian masalah sosial-kemasyarakatan yang telah dihasilkan oleh berbagai kalangan, akan tetapi tampaknya belum banyak dimanfaatkan secara baik, hal ini disebabkan belum tersebarnya kajian-kajian tersebut secara luas.

Penerbitan **Jurnal Sosiologi** ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi diantara mereka yang ahli, peminat, dan yang menggariskan kebijakan sehingga hasil-hasil penelitian serta buah pikiran tentang masalah-masalah sosial-kemasyarakatan dapat dimanfaatkan secara optimal. Keinginan untuk menerbitkan jurnal ini, selain berangkat dari pengamatan faktual yang memperlihatkan masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi akademis yang kondusif bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, juga didasarkan atas suatu perasaan yang seolah-olah mengharuskan kita untuk tetap memelihara sesuatu hal positif yang telah dirintis para pendahulu. Komunikasi antar ilmuwan, atau penyebaran hasil-hasil penelitian ilmiah, kini benar-benar telah dirasakan sebagai suatu tuntutan yang harus dipenuhi dunia keilmuan. Sebab, bagaimana mungkin kita secara bersama-sama mampu mengembangkan diri tanpa melalui evaluasi yang terus menerus, dan bagaimana mungkin kita bisa melakukan evaluasi tanpa melalui evaluasi tanpa saling mengetahui apa yang kita miliki dan kerjakan. Setidaknya, untuk tujuan agar kita —ilmuwan dan peminat ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan— saling mengetahui dan saling bertukar informasi itulah media ini hadir, sudah barang tentu dengan harapan yang lebih jauh lagi, yakni agar keadaan tersebut juga bisa menjadi salahsatu unsur dalam penciptaan komunikasi akademis yang kondusif bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial tadi.

Terbitan **Jurnal Sosiologi** pada nomor perdana ini, meskipun dirasakan masih belum mampu menjangkau isi yang memuaskan, namun toh merupakan hasil kerja yang cukup sulit. Bagaimanapun, nomor ini masih akan disusul oleh nomor-nomor berikutnya yang diharapkan bisa terus diperbaiki kualitasnya. Tentu saja, sebagian dari upaya perbaikan tersebut, adalah kewajiban dari sidang pembaca juga.

Akhir kata, redaksi mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah mempercayakan karyanya untuk dipublikasikan melalui jurnal ini, demikian juga kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Redaksi

SOSIOLOGI

JURNAL ILMIAH KAJIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

DAFTAR ISI

1. Keserasian Sosial dan Partisipasi Etnik Lampung dalam Pembangunan di Pedesaan (<i>Hartoyo</i>)	1-9
2. Implikasi Institusi Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat (<i>Abdulsyani</i>)	10-15
3. Konflik Kepentingan Perusahaan HPH dengan Penduduk Sekitar Hutan (<i>Handi Mulyaningsih</i>)	16-24
4. Kelembagaan Kelompok Tani pada Program Padat Karya Sektor Kehutanan (P2KSK) (<i>Sujarwo</i>)	24-32
5. Pengaruh Kualifikasi/Pengelola dan Pesaing terhadap Efisiensi Pelayanan KUD (<i>Satria Bangsawan</i>)	33-39
6. Transmigrasi Swakarsa: Motivasi, Proses Pengambilan Keputusan Pindah, dan Proses Kepindahannya (<i>I Gede Sidemen</i>)	40-51
7. Tracer Study: Kebijaksanaan Program Bangga Suka Desa dalam Pengentasan Kemiskinan (<i>Sindung Haryanto</i>)	52-61
8. Masalah Kemiskinan pada Masyarakat Desa (<i>Erom Djuhendar</i>)	62-66
9. Faktor Sosial Budaya yang Menghambat Kinerja Bidan Puskesmas dalam Pelayanan KB dan Kesehatan di Kecamatan Natar Lampung Selatan (<i>Pairulsyah</i>)	67-73
10. Pembentukan Perilaku KB Mandiri bagi Ibu Rumah tangga yang Berperan Ganda (<i>Paraswati DM</i>)	74-79
11. Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana pada LP Raja Basa Bandar Lampung (<i>Suwarno</i>)	80-86
12. Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Perbaikan Kampung (<i>Benyamin</i>)	86-94

KONFLIK KEPENTINGAN PERUSAHAAN HPH DENGAN PENDUDUK SEKITAR HUTAN

Oleh:

Handi Mulyaningsih

(Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung)

ABSTRACT

Interaction between populations around with the forest diverse because the Forest Exploitation Company (HPH). This situation causes food population security downward, and causes a conflict. This study intended to analyze conflict causes between the Forest Exploitation Company (HPH) with population. Descriptive qualitative was the method of analysis and use the conflict theory of Dahrendorf. The study result that conflict caused of different interest but the conflict happened is not interest conflict.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Apabila orang berbicara tentang hutan, pasti yang terlintas pertamakali di dalam benak adalah suatu wilayah luas yang tertutup pepohonan dan tumbuhan lain, sepi dan senyap dari keramaian manusia, dan hanya suara berbagai hewan dan binatang yang terdengar. Meskipun ekologi hutan terbayang sangat angker, tetapi hutan berfungsi ekologis maupun ekonomis. Fungsi ekologis hutan adalah untuk menjaga keseimbangan ekologi hutan sehingga keanekaragaman hayati maupun hewani terjaga, terhindar dari bahaya banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Adapun fungsi ekonomis hutan adalah memberikan manfaat bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Apabila dicermati lebih lanjut, hutan ternyata tidak sesenyap yang dibayangkan manusia. Hutan ternyata tidak lepas dari hiruk pikuk manusia yang saling bertikai. Di Propinsi Lampung bahkan pernah tercatat konflik yang menjadi pembicaraan di tingkat nasional yaitu konflik di Way Jepara, juga berbagai konflik lain yang terjadi di dalam hutan seperti di Bukit Kemuning, Cukuh Balak, Pulau Panggung, dan sebagainya.

Apabila dicermati, ternyata konflik yang terjadi di hutan jenisnya beraneka ragam. Ada konflik antara penduduk asli dengan pendatang, konflik antara masyarakat dengan pemerintah, konflik antara penduduk yang tinggal disekitar hutan dengan perusahaan HPH. Untuk saat ini, tulisan ini mencoba untuk mencermati lebih lanjut penyebab terjadinya konflik antara perusahaan HPH dengan penduduk yang tinggal di sekitar hutan.

2. Permasalahan

Mengapa terjadi konflik antara penduduk yang tinggal di sekitar hutan dengan perusahaan HPH?

3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis penyebab timbulnya konflik antara penduduk yang tinggal di sekitar hutan dengan perusahaan HPH.

Tinjauan Pustaka

Untuk menjelaskan timbulnya konflik di hutan, maka perlu diketahui bagaimana hubungan manusia dengan hutan. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, hutan merupakan sumber ketahanan pangan (*food security*). Hubungan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat erat. Dari hutan penduduk sekitar hutan mendapatkan pangan, makanan ternak, kayu bakar, obat-obatan, pekerjaan, pendapatan, sehingga status gizi keluarga dapat terpenuhi. Meskipun ketergantungan mereka terhadap hutan sangat besar, tetapi hal ini tidak menjadikan mereka mengeksploitasi hutan secara besar-besaran untuk tujuan komersial. Dengan kata lain, hutan hanyalah dimanfaatkan secara subsisten. Selain itu, di dalam memanfaatkan fungsi hutan, penduduk sekitar hutan berusaha agar kelestarian hutan tetap terjaga. Keadaan ini terjadi karena hutan selain berfungsi untuk sumber ketahanan pangan keluarga, hutan bagi penduduk sekitarnya juga mengandung makna religius, kebudayaan, dan sistem pertanian. Makna religius hutan bagi masyarakat selama ini berperan penting dalam kelestarian hutan. Banyak kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos yang tumbuh yang berkaitan dengan hutan. Masyarakat sekitar hutan berinteraksi dengan sesamanya dengan nilai-nilai yang bersumber dari hutan. Masyarakat juga menjalankan sistem pertanian yang disesuaikan dengan lingkungan hutan yaitu perladangan. Semua ini secara keseluruhan menyebabkan hutan tetap lestari sehingga masyarakat juga dapat terus mengambil manfaat ekonomisnya.

Masyarakat yang hidupnya memanfaatkan hutan melalui perladangan berpindah, melakukan sistem perladangan sesuai dengan *Local Technical Knowledge*, yaitu pengetahuan teknis untuk mengelola sumberdaya alam sekitarnya sesuai sumber daya lingkungan dan hasil yang diharapkan (Knigh, 1990, dalam Warner, Katherine, 1991). Pengetahuan mereka dalam mengelola hutan diperoleh secara turun temurun sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi aturan adat setempat.

Selama hubungan antara manusia dengan hutan berjalan serasi, konflik (manifest/latent) pasti ada meskipun dapat diminimalisir. Kehadiran perusahaan HPH ke hutan untuk mengeksploitasi hutan di satu sisi dapat terus menjaga keseimbangan sistem kalau sistem sosial yang ada tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya (adaptasi), kebutuhan akan alat untuk mencapai tujuan, kebutuhan untuk mempertahankan kesatuannya, serta kebutuhan untuk mempertahankan diri (Parsons dalam Poloma, 1994). Sebaliknya akan menimbulkan konflik kalau sistem yang ada tidak fungsional bagi anggota-anggotanya, tetapi konflik yang terjadi pada akhirnya akan menuju pada keseimbangan sistem kembali (Cosser dalam Poloma, 1994). Tetapi menurut Dahrendorf, kehadiran perusahaan HPH akan cenderung menimbulkan konflik karena ada perbedaan kepentingan antara perusahaan HPH dengan penduduk yang tinggal di sekitar hutan (Craib, 1994).

Metode Analisis

Permasalahan yang diajukan di dalam tulisan ini akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Maksudnya adalah mendiskripsikan fenomena-fenomena melalui data-data sekunder, hasil-hasil penelitian dan pendapat-pendapat para ahli dan kemudian dianalisis secara teoritis.

Pembahasan

Penduduk yang tinggal di dalam hutan maupun yang tinggal di sekitar hutan dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu peladang berpindah dan transmigran spontan. Mereka yang dikategorikan sebagai peladang berpindah adalah orang-orang dari suku asli yang melakukan kegiatan pertanian secara berpindah. Hasil penelitian yang dilakukan P3PK UGM di Kecamatan Nunukan, Krayan, dan Kayan Hulu (Mubyarto dkk, 1991) menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan hutan pada masyarakat peladang berpindah, sangat erat. Bagi mereka hubungan antara manusia dan hutan adalah merupakan sebuah ekosistem. Melalui kebudayaan yang mereka hayati yang merupakan warisan dari nenek moyang, mereka mengelola hutan dengan cara-cara tertentu yang mengakibatkan ekologi hutan tetap dapat dipertahankan kelestariannya.

Sistem pertanian perladangan merupakan salah satu bentuk kebudayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Aktifitas perladangan selalu dimulai dengan mencari tanah atau membuka hutan untuk ladang mereka. Prosedur yang harus ditempuh untuk membuka hutan adalah memperoleh izin dari Kepala Suku. Setelah ijin diperoleh maka peladang mulai mencari lahan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Mering Ngo menjelaskan bahwa masyarakat Suku Daya memilih lahan yang berwarna hitam pekat dan subur (Mubyarto, 1991). Meskipun lahan sudah ditemukan tetapi tidak dapat dibuka kalau pada lahan tersebut tidak ditemukan pucuk dedaunan yang berwarna hijau tua dan pohon yang di atas lahan minimal berdiameter 20 cm, dan tumbuh jenis pakis tertentu. Bila persyaratan telah dipenuhi, lahan boleh dibuka dengan jalan menebang pohon-pohon dan membakarnya. Penebangan pohon juga memiliki aturan yaitu sampai pada sederetan pohon-pohon yang dipakai sebagai pembatas, sehingga ketika dilakukan pembakaran tidak merembet pada hutan yang lain. Bagi mereka pembakaran pohon juga diatur sehingga tingkat kesuburan tanah diperoleh secara maksimal.

Sejarah manusia dan ekologi yang melingkupi kehidupan manusia berperan penting pada terbentuknya suatu kebudayaan. Ekologi hutan yang telah diakrabi masyarakat yang tinggal di dalam hutan/sekitar hutan serta sejarah masyarakat tersebut dari generasi ke generasi membuat mereka mengerti sifat-sifat hutan. Mereka memahami cara-cara mengelola hutan sehingga tidak merusak ekosistem hutan. *Coomans (1987)* menjelaskan bahwa masyarakat Daya di Kalimantan Timur mempunyai suatu sistem pertanian yang sangat bijaksana. Untuk waktu yang lama masyarakat Dayak tetap bermukim di suatu tempat, tetapi lahan yang dikerjakan berpindah-pindah di sekitar desa mereka. Setelah 25 tahun tanah bekas perladangan dipergunakan kembali untuk ditanami padi dan palawija (Mubyarto, 1991). Sistem ini dapat mencegah kerusakan hutan sementara fungsi ekonomi hutan dapat dipergunakan untuk memperoleh *food security*. *Seavoy (1973)*, menjelaskan bahwa para peladang di Kalimantan Timur menanam 3 jenis tanaman utama yaitu padi, mentimun, dan jagung (Mubyarto, 1991). Padi dan mentimun ditanam bersamaan, padi akan masak setelah umur 6 bulan. Mentimun berguna untuk pelepas dahaga ketika mereka menjaga tanaman padi dan ketika panen padi.

Jagung ditanam terpisah karena berumur lebih pendek yaitu 3 bulan. Setelah 3 bulan jagung dipanen dan menjadi makanan pokok. Setelah 3 bulan menikmati jagung, padi mulai dipanen dan mereka mengganti makanan pokoknya dengan beras. Padi ditanam sekali setahun, sesudah panen padi peladang menanam lahannya dengan jagung, mentimun, ubi kayu, tebu, kacang panjang, labu, dan sebagainya. Apabila ada waktu senggang mereka berburu.

Tata cara perladangan secara bijaksana oleh peladang untuk diambil fungsi ekonominya tanpa mengganggu fungsi ekologisnya, mulai terganggu karena sebagian besar areal hutan dijadikan areal konsesi hutan. Akibatnya areal perladangan semakin sempit sehingga siklus perladangan semakin pendek yaitu 5-10 tahun bahkan akhirnya tinggal 2-3 tahun (Mubyarto, 1991). Dengan siklus yang pendek maka kelestarian hutan tidak dapat dipertahankan lagi karena ladang yang telah ditanami tidak diberi kesempatan untuk menghidupkan kembali. Sempitnya areal perladangan dan goyahnya kelestarian hutan dapat mengakibatkan ketahanan pangan peladang goyah. Bagi penduduk yang ada di kawasan hutan, hutan berfungsi sebagai penyangga seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Tanpa hutan, eksistensi mereka tidak dapat dipertahankan. Padahal berdasarkan data Departemen Kehutanan tahun 1985 diperkirakan ada 1,2 juta keluarga peladang berpindah yang memanfaatkan areal hutan seluas 9,3 sampai 11 juta hektar. Studi RePPProt (Regional Physical Planning Program for Transmigration) memperkirakan ada sejumlah 1.199.970 keluarga peladang berpindah yang menggunakan 11.402.300 hektar lahan pada tahun 1991. Sementara itu Poffenberger memperkirakan bahwa pada tahun 1991 hampir 3-40 juta orang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Moriaga, 1993).

Selain masyarakat peladang, hutan juga menjadi sumber kehidupan bagi transmigran-transmigran spontan (pendatang) yang gagal memperoleh tanah dan penghidupan yang diharapkannya. Hasil penelitian Kampto Utomo di tiga lokasi di Lampung pada tahun 1957 menunjukkan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, transmigrasi spontan telah memasuki kawasan hutan tanpa memperhatikan adanya hutan larangan, tanah marga dan sebagainya (Tirtosudiro 1993). Mereka dapat dikatakan sebagai penyebab kerusakan hutan karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan hutan secara bijaksana seperti peladang. Di samping itu, motivasi mereka memanfaatkan hutan hanyalah untuk kepentingan ekonomi dan tidak mepedulikan kepentingan ekologi hutan. Terlepas dari akibat-akibat pemanfaatan hutan yang *sebrono*, bagi mereka hutan adalah tumpuan hidup karena menjadi sumber ketahanan pangan. Dari hutanlah mereka hidup dan menghidupi keluarganya dan mencukupi kebutuhannya yang lain.

Interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan hutan yang antagonis seperti itu, kini semakin sulit ditemukan. Hal itu terjadi karena masuknya para kapitalis ke hutan-hutan. Sejak diturunkan UUPK no. 5 tahun 1967 dan PP no. 21 tahun 1970, banyak pengusaha-pengusaha terjun di bidang perusahaan hutan. Kekuatannya di bidang modal menyebabkan mereka dapat menguasai hutan dalam luasan yang sangat besar. Tempo Oktober 1991 mencatat ada 15 pengusaha HPH terbesar di Indonesia yang menguasai rata-rata 1 juta hektar hutan. Tetapi sebetulnya mereka adalah grup pemegang HPH yang berjumlah 574 (Mubyarto, 1990). Laporan FAO mencatat bahwa pada tahun 1988 kekuasaan HPH mencapai 57,9 juta hektar. Tetapi sampai pertengahan 1990 dari seluruh areal konsesi yang ada, hampir setengahnya sudah dilakukan penebangan, sementara penanaman kembali sampai 1988 baru bisa mencapai kawasan hutan seluas 1,2 juta hektar (4% dari luas hutan yang ditebang) (Abdon Nababan

dalam Radjab, 1997). Kekuasaan perusahaan HPH dalam areal yang jumlahnya sangat besar, telah mengurangi *lebensraum* masyarakat yang semula juga memanfaatkan areal tersebut. Di Kabupaten Tanjungjabung, Sarolangun Bangko, dan Bungo Tebo Propinsi Jambi, sebagian besar wilayah pemukiman desa dan areal lahan usahatani masyarakat tersebut kini sebagian besar termasuk dalam areal konsesi hutan (Mubyarto, 1990). Akibat selanjutnya dari berkurangnya areal usahatani peladang adalah berkurang pula sumber kehidupan mereka, artinya pendapatan menurun. Kehadiran HPH telah menggeser pekerjaan masyarakat dari mencari kayu menjadi pencuri kayu (Mubyarto, 1990).

Kekuatannya di bidang modal juga menyebabkan perusahaan HPH memiliki kemampuan memobilisasi aparat sipil maupun militer untuk mendukung kegiatannya. Dukungan aparat pemerintah dapat menimbulkan kondisi represif di dalam masyarakat. Aparat pemerintah dapat mempergunakan kekuatan koersifnya guna memaksa rakyat mendukung kehendak pelaku ekonomi ekstraktif. Sebagai pihak yang memiliki modal, perusahaan HPH mampu menciptakan saluran-saluran untuk memperkuat kedudukannya. Seperti dikeluarkan PP no 21 tahun 1970 pasal 5, di dalamnya disebutkan bahwa " demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan". " Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat, dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan... tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan pelaksanaan Undang-Undang ini" (UUPK no 5 tahun 1962 pasal 17).

Keluarnya undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pemegang HPH mampu menciptakan nilai-nilai rasionalitas yang baru yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang lama. Hukum adat sebagai nilai-nilai lama harus dirasionalkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru tersebut adalah hukum adat hanya boleh dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang baru. Untuk kepentingan umum maka hak-hak rakyat dipangkas, padahal hak-hak rakyat untuk hidup juga merupakan kepentingan umum. Sebetulnya hal ini adalah upaya pihak pengusaha HPH agar kedudukannya di hutan semakin kuat.

Keluarnya peraturan tersebut tidak pernah mengikutsertakan pendapat masyarakat tetapi mereka menerima akibat peraturan tersebut. Habermas (Hardiman, 1993) berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis lanjut, rutinisasi penerimaan keputusan-keputusan tanpa konsensus menyebabkan kesenjangan antara motivasi dan norma-norma, sehingga sistem kepribadian tidak memperoleh keutuhannya. Apabila di dalam situasi keraguan ini sistem politik dapat meyakinkan bahwa keputusan yang dikeluarkan dapat memberi jalan yang terbaik, maka kesenjangan akan mengecil. Sebagaimana halnya dengan keputusan untuk mengeluarkan masyarakat yang hidup di kawasan hutan keluar dari hutan dapat menimbulkan kesenjangan antara motivasi dengan norma-norma tetapi dapat memperkecil kesenjangan tersebut. Apabila ternyata hasil dari keputusan memukimkan kembali ternyata dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, maka kesenjangan tersebut semakin mengecil. Tetapi apabila hasil dari memukimkan kembali adalah memiskinkan masyarakat, maka akan terjadi kesenjangan yang mengakibatkan timbulnya keterasingan.

Apa yang diperoleh negara dari perusahaan HPH ternyata tidak banyak. Selama periode 1983-1989 sektor kehutanan hanya menyumbang 1 persen dari total Product Domestic Bruto (PDB), jauh di bawah sumbangan sektor pertanian yang mencapai 5,5%. Hasil temuan Tim

Ekonomi Walhi atas semua jenis pajak dan iuran yang masuk ke pemerintah pusat selama periode 1984-1989, ternyata menunjukkan pengusahaan hutan tidak pernah menyumbang lebih dari 2% total penerimaan pemerintah. Tim Walhi juga menunjukkan bahwa sumbangan penerimaan kehutanan atas anggaran belanja negara setiap tahun tidak lebih dari 0,1%. Dari segi ketenagakerjaan, sektor kehutanan juga menyerap 0,3% dari total tenaga kerja pada semua sektor dan hanya 0,5% dari total tenaga kerja dalam sektor pertanian (Radjab, 1997).

Selain tidak menguntungkan, eksploitasi hutan oleh para kapitalis telah menyebabkan timbulnya berbagai krisis, seperti krisis ekologi. Sumberdaya alam ternyata terbatas jumlahnya, dan ekosistem juga memiliki keterbatasan untuk menyerap zat-zat yang mencemarkan lingkungan, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekologis. Bahkan menurut Habermas, ketidakseimbangan ekologis tidak hanya menyangkut alam luar (*outer nature*) tetapi juga integrasi alam dalam (*inner nature*) (Hardiman, 1993). Hutan dengan sumberdaya alamnya yang sebetulnya dapat bersifat diperbarui sebagaimana dilakukan orang-orang suku asli yang mempergunakan *lokal knowledge*, di tangan kapitalis yang "rakus" menjadi sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, karena kesempatan hutan menghidup kembali tidak diperoleh. Sampai tahun 1990, luas hutan alam Indonesia tinggal 109 juta hektar atau 56% dari total daratan. Berdasarkan proyeksi, tahun 2000 hutan alam akan tinggal 99 juta hektar dan tahun 2020 akan tinggal 89 juta hektar (Wibowo dalam Radjab, 1997d). Gangguan keseimbangan ekologis merupakan masalah yang timbul karena *imperatif-imperatif* pertumbuhan ekonomis dari sistem ekonomi. Tuntutan obyektif sistem ini dipenuhi dan mendorong pertumbuhan produksi dan populasi dalam skala dunia. Untuk memenuhi kebutuhan produksi dan populasi, eksploitasi alam harus ditingkatkan, tetapi dalam kenyataannya menemui dua macam keterbatasan, keterbatasan sumber daya dan keterbatasan ekosistem untuk menyerap zat-zat yang mencemarkan lingkungan. Krisis yang sangat serius adalah masalah ekosistem, sebab konsumsi energi tidak hanya menyebabkan krisis sumber, tetapi juga peningkatan pemanasan global.

Krisis ekologis dalam bidang kehutanan disebabkan perusahaan HPH merupakan jenis perusahaan ekstraktif. Perusahaan ini sangat konsumtif dalam pemanfaatan sumber alam sehingga memiliki kecenderungan untuk tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam tersebut (Soetrisno, 1995). Perusahaan HPH mengkonsumsi sumber alam hutan secara besar-besaran untuk memperoleh keuntungan dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Fakta bahwa harga kayu gelondongan yang terlalu murah telah menyebabkan terjadinya investasi yang melebihi kemampuan hutan yang ada untuk memasoknya. Dari 64,4 juta hektar hutan produksi, 53 persen atau 39,9 juta hektar diantaranya ditujukan bagi produksi kayu secara tetap. Sisanya ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas yang juga berfungsi sebagai hutan lindung (Mubariq, 1992). Kelebihan permintaan industri kayu dibandingkan dengan kemampuan hutan untuk memasoknya, menimbulkan adanya kecenderungan untuk mempercepat proses *deforestasi*.

Jika ketidakseimbangan ekologis adalah masalah alam luar (*outer nature*), ketidakseimbangan antropologis adalah masalah integrasi alam dalam (*inner nature*). Yang dimaksud adalah gangguan konsistensi sistem kepribadian atau keterasingan individu (Habermas dalam Hardiman, 1993). Hal ini berhubungan dengan sosialisasi dalam masyarakat kapitalis lanjut. Karena dalam masyarakat kapitalis lanjut kemampuan pengendalian mengharuskan otoritas-otoritas pengambil keputusan bersifat independen dari motivasi para warga, maka sosialisasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan dalam sistem ini. Itulah sebabnya

sistem politik harus diatur agar loyalitas warga dapat diraih. Masyarakat di sekitar hutan kini tidak dapat mengerjakan pertanian perladangan dan mengambil manfaat ekonomis hutan sebagaimana biasanya. Ada nilai-nilai baru yang secara radikal harus diadopsi dan dalam waktu yang singkat perilakunya harus berubah sesuai dengan nilai yang baru. Nilai-nilai lama yang bersumber dari adat kini tidak boleh dilakukan, seperti berladang di areal hutan tertentu sesuai dengan hak ulayat tidak diperbolehkan. Ironisnya, pendatang baru (perusahaan HPH) dengan enaknya melakukan pembabatan hutan.

Lebih ironis lagi, para peladang kini dikenakan program pemukiman kembali yaitu program yang berusaha mengendalikan masyarakat peladang, karena selama ini peladang dinyatakan sebagai biang kerusakan hutan. Mungkin pernyataan ini ada benarnya. Tetapi logika yang menyebutkan bahwa peladang memiliki pengetahuan lokal untuk mengelola hutan (tapi tidak merusak hutan (Dove, 1985), pasti menyangkal bahwa peladang adalah biang kerusakan hutan. Program pemukiman kembali peladang ibarat penyingkiran peladang dari hutan. Program ini akan memisahkan peladang dari *lebensraumnya* yaitu hutan, dan merubah pola hidupnya menjadi petani menetap yang menurut rencana lebih produktif dan mampu menjaga lingkungan. Program ini harus dielan oleh peladang walau pahit, karena ia harus disingkirkan dari kehidupannya selama ini. Dalam kehidupannya selama ini, penduduk sekitar hutan memiliki kebudayaan sendiri, dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang diyakini akan membawa kebaikan bagi hidupnya, ada mitos-mitos, religi, yang semuanya hidup karena berinteraksi dengan hutan. Memindahkan manusia dari lingkungan yang selama ini menghidupinya, dalam arti material dan spiritual, dapat dikatakan sebagai mematikan rasa kemanusiaan. Keadaan ini akan menyebabkan alienasi, atau anomie. Sebaliknya, perusahaan HPH sebagaimana sistem ekonomi ekstraktif pada umumnya selalu menciptakan *enclave* tengah-tengah masyarakat (Soetrisno, 1995). Mereka menciptakan lingkungan yang terisolir dari lingkungan penduduk sekitarnya seperti perumahan lengkap dengan fasilitasnya yang modern, dan fasilitas-fasilitas lain untuk menunjang kehidupan mereka seperti rumah, tempat bermain, sekolah, sarana ibadah dan sebagainya. Hubungan-hubungan sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya juga terbatas, karena mereka hanya berhubungan dengan orang-orang yang bertempat tinggal di lingkungan perumahan tersebut.

Hadirnya perusahaan HPH untuk mengeksploitasi hutan ternyata sulit untuk tetap menjaga keseimbangan sistem sosial masyarakat sekitar hutan. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak dapat menerima norma-norma dan nilai-nilai baru yang mengatur hubungan masyarakat dengan hutan. Integrasi antara sistem sosial yang lama dengan sistem sosial yang baru tidak terbentuk, sehingga masyarakat harus bertahan hidup dalam keadaan yang sangat minimal. Memang kadang-kadang masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi baru, seperti menjadi pencuri kayu (Mubyarto, 1990), agar mereka terus bertahan hidup. Hanya saja mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan alat yang tidak sesuai dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial seperti nilai-nilai dan norma-norma. Selain itu, kepentingan masyarakat untuk terus bertahan di hutan bertentangan dengan kepentingan perusahaan HPH untuk terus menguasai hutan dengan segala keuntungan lainnya.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan HPH dengan penduduk yang tinggal di sekitar hutan dapat menimbulkan konflik kepentingan selama kelompok-kelompok yang berkonflik terorganisir. Menurut Dahrendorf (dalam Poloma, 1994), terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir akan menimbulkan konflik yang menjurus pada perubahan

struktur. Tetapi agaknya perspektif teoritis Dahrendorf ini tidak selalu menjadi kenyataan. Beberapa alasan dapat dikemukakan, pertama membentuk kelompok kepentingan yang terorganisir adalah sulit bagi massa karena biasanya massa tidak mengetahui secara persis apa yang diinginkannya. Sebagaimana Marx pernah mengharapkan timbulnya revolusi proletar yang terorganisir, tetapi dalam kenyataannya pengorganisasian kaum proletar harus dilakukan oleh aktor dari luar kelompok tersebut. Kedua, di samping kesulitan yang timbul karena ketidakmampuan massa untuk membentuk kelompok kepentingan, kesulitan juga timbul karena struktur politik yang tidak menghendaki munculnya kelompok kepentingan. Ketiga, walaupun sifat industri yang ekstraktif adalah merugikan karena boros sumberdaya alam dan memiliki kecenderungan untuk membentuk lingkungan secara *enclave*, tetapi industri ini mampu memobilisasi aparat pemerintah, untuk mendukung kegiatannya seperti melakukan pengurusan-pengurusan sampai pada pembuatan peraturan. Pemerintah bahkan seringkali bersikap pragmatis terhadap terjadinya konflik yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, dalam arti pemerintah akan mendukung pihak yang menguntungkan pemerintah.

Jadi meskipun ada kesenjangan kepentingan tetapi dengan sistem politik yang otoriter, sikap pemerintah yang bersifat pragmatis, serta ketidakmampuan massa untuk mengorganisir diri, maka konflik kepentingan tidak akan terjadi. Apabila konflik yang terjadi tidak merupakan konflik antara dua pihak yang masing-masing terorganisir dalam kelompok kepentingan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai konflik kepentingan sebagaimana yang dinyatakan Dahrendorf. Beberapa bentuk perlawanan yang pernah terjadi adalah dalam bentuk gerakan mesianis, perlawanan diam-diam (protes bisu), dan konflik semu atau konflik yang ditanggihkan.

Bagi kapitalis, semua dampak sosial seperti itu tidak penting. Bagi kapitalis, yang penting di dalam menjalankan kapitalnya adalah kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tidak terusik. Sebagaimana dikatakan Weber (dalam Poole, 1993), logika kapitalis didasarkan pada rasionalitas instrumental yaitu rasionalitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kesimpulan

Kehadiran perusahaan HPH untuk mengeksploitasi hutan menimbulkan konflik dengan penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Konflik tersebut terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang menjurus pada semakin besarnya kekuasaan pada satu pihak terhadap hutan dan semakin kecilnya kekuasaan pada pihak lain terhadap hutan seperti terlihat pada semakin menurunnya ketahanan pangan keluarga. Meskipun demikian, konflik yang terjadi bukan konflik kepentingan, karena ada beberapa kendala untuk mengorganisir massa ke dalam kelompok kepentingan.

Mengingat eratnya hubungan penduduk yang tinggal di sekitar hutan dengan hutan, maka untuk menyelesaikan konflik dan menjaga ketahanan keluarga haruslah dengan cara tetap mengikutsertakan penduduk yang tinggal dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hutan. Untuk itu program kehutanan sosial perlu digalakkan. Dengan cara demikian, maka kepentingan perusahaan HPH juga akan terus dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mubariq. 1992. "Rente Ekonomi dan Eksploitasi Hutan Tropis", *Prisma*. No. 6 tahun XXI.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Craib, Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dove, Michael. 1985. *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjahmada Press.
- Hardiman, Budi F. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moniaga, Sandra. 1993. "Menuju Hutan Masyarakat Swakelola dan Hubungannya dengan Pengakuan Atas Hak Milik Adat di Pulau-pulau di Luar Jawa (Suatu Analisis Hukum dan Kebijakan)", dalam INFID. *Pembangunan di Indonesia Memandang dari Sisi Lain*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto dkk, 1990. *Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- _____, 1991. *Hutan, perladangan dan Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- _____, 1992. *Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial Antropologi di Propinsi Jambi*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Ngo, Mering. 1990. "Hak Ulayat Masyarakat Setempat: Pelajaran dari Orang Kayan dan Limbai", dalam *Prisma*, No. 6, Thn. XXI.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Solidaritas
- Poole, Roos. 1993. *Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Radjab, Budi. 1990. "Pertanian Perladangan Berpindah di Luar Jawa", *Prisma*, no. 7. Thn. XXVI.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1995. "Ekonomi Ekstraktif dan Ekonomi Tradisional". *Tirias* No. 31/THN.II/31 Agustus
- Tirtosudarmo, Riwanto, 1993. "Dimensi Sosio Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pemukiman Perambah Hutan". *Populasi*, Vol 4 no. 2.
- Warner, Katherine, 1991, *Shifting Cultivators Local Technical Knowledge and Natural Resources Management in Human Tropics*. Food and Agricultural Organization of The United Nations, Rome.